



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2024



Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai wujud pelaporan capaian strategis yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran telah dapat diselesaikan.

Dengan tersusunnya LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat diketahui hasil yang telah dicapai baik tugas pokok, fungsi dan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan Pembangunan di Daerah dan Dokumen ini merupakan proses akhir atau final dari serangkaian dokumen yang berkaitan dengan kinerja suatu Perangkat Daerah dan berpatokan kepada hasil analisis dan perbandingan dengan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini dapat menjadi salah satu referensi dalam upaya meningkatkan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun berikutnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan yang terpenting memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam bentuk pertanggung jawaban yang disebut Akuntabilitas Kinerja.

LKjIP ini masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga dalam penyusunan perlu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa yang akan datang dan penyusunan dokumen perencanaan lainnya. Kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan pendapat sehingga tersusunnya LKjIP ini, diucapkan terima kasih.

Samarinda, Februari 2025
Kepala Pelaksana,

Drs. Agus Tianur, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508141998031006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024. Berbagai capaian tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2021 - 2024 adalah sebagai berikut:

Capaian Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			TAHUN 2024		
		2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Target RENSTRA 2019 – 2023							
1	Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	98,04	100	100	-	-	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,37	80,46	82,89	-	-	-
Target RENSTRA 2024 – 2026							
1	Indeks Ketahanan Daerah	-	-	-	0,633	0,530	84,13
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	-	70,01	70,70	100,98

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi.....	1
B. Tugas dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi.....	2
D. Sumber Daya Manusia	5
E. Aspek Strategis Organisasi	7
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	8
G. Sarana dan Prasarana	10
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	11
A. Perencanaan Strategis	11
B. Indikator Kinerja Utama	16
C. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	18
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....	27
C. Analisa Capaian Kinerja	39
D. Realisasi Anggaran	59
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan Umum	60
B. Langkah Kedepan	61
C. Saran.....	61

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
Tabel 1.2	Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan	5
Tabel 1.3	Klasifikasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Golongan.....	6
Tabel 1.4	Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Jabatan	6
Tabel 1.5	Klasifikasi Pegawai Dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan Tingkat Jabatan .	7
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	11
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	12
Tabel 2.3	Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	12
Tabel 2.4	Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	13
Tabel 2.5	Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	15
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026	16
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	16
Tabel 2.8	Target dan Realisasi Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	17
Tabel 2.9	Anggaran belanja sasaran strategis Tahun 2024.....	17
Tabel 3.1	Penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dan 2023	18
Tabel 3.2	Tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil evaluasi terhadap implementasi sistem AKIP Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	22
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024	27
Tabel 3.4	Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021 – 2024	28
Tabel 3.5	Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2024	39
Tabel 3.6	Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024	40

Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Antar Provinsi	40
Tabel 3.8	Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap target akhir RENSTRA	40
Tabel 3.9	Tingkat Efisiensi Penyerapan Anggaran	42
Tabel 3.10	Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan.....	42
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Antar Provinsi	43
Tabel 3.12	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	51
Tabel 3.13	Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024	51
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Antar Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.....	51
Tabel 3.15	Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap target akhir RENSTRA	52
Tabel 3.16	Tingkat Efisiensi Penyerapan Anggaran	53
Tabel 3.17	Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan.....	53
Tabel 3.18	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Antar Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.....	54
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi....	44
Gambar 3.2	Pelaksanaan Koordinasi Teknis Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Provinsi Kalimantan Timur	45
Gambar 3.3	Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2024.....	45
Gambar 3.4	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	46
Gambar 3.5	Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Banjir di Kabupaten Paser	47
Gambar 3.6	Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Dapur Umum untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Banjir di Kabupaten Paser	47
Gambar 3.7	Asistensi Pemproperda Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka Pengusulan Perda Penanggulangan Bencana Karhutla Provinsi Kalimantan Timur	48
Gambar 3.8	Pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	48
Gambar 3.9	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) di Kabupaten Kutai Timur....	49
Gambar 3.10	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Provinsi Kalimantan Timur	49
Gambar 3.11	Dokumentasi Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	50
Gambar 3.12	Pelaksanaan Kegiatan Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	55
Gambar 3.13	Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana Se – Kalimantan Timur Tahun 2024	55
Gambar 3.14	Pelaksanaan Kegiatan Resiliensi Penanggulangan Bencana Wilayah Kalimantan Tahun 2024.....	56
Gambar 3.15	Mengikuti Kegiatan <i>Basic Drone Operation & Mapping Remote Pilot Certification Training</i>	57
Gambar 3.16	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan **Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009** tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai tindak lanjut dari **Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007** tanggal 26 April 2007 pada **Bab III**. Tanggung Jawab dan Wewenang pada **Pasal 5** disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan **Pasal 18 ayat 1** “Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah”. Memperhatikan dasar-dasar hukum lainnya, yaitu antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Asing *Non* Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor. 02 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tanggal 22 Oktober 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Bab II Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota; Bagian Kedua Kedudukan; Pasal 3 disebutkan bahwa 1) BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah; 2) BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, tanggal 26 April 2007 pada Pasal 21, Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil, setara dan tepat sasaran;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya;
6. Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran dana dan barang;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang undangan.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

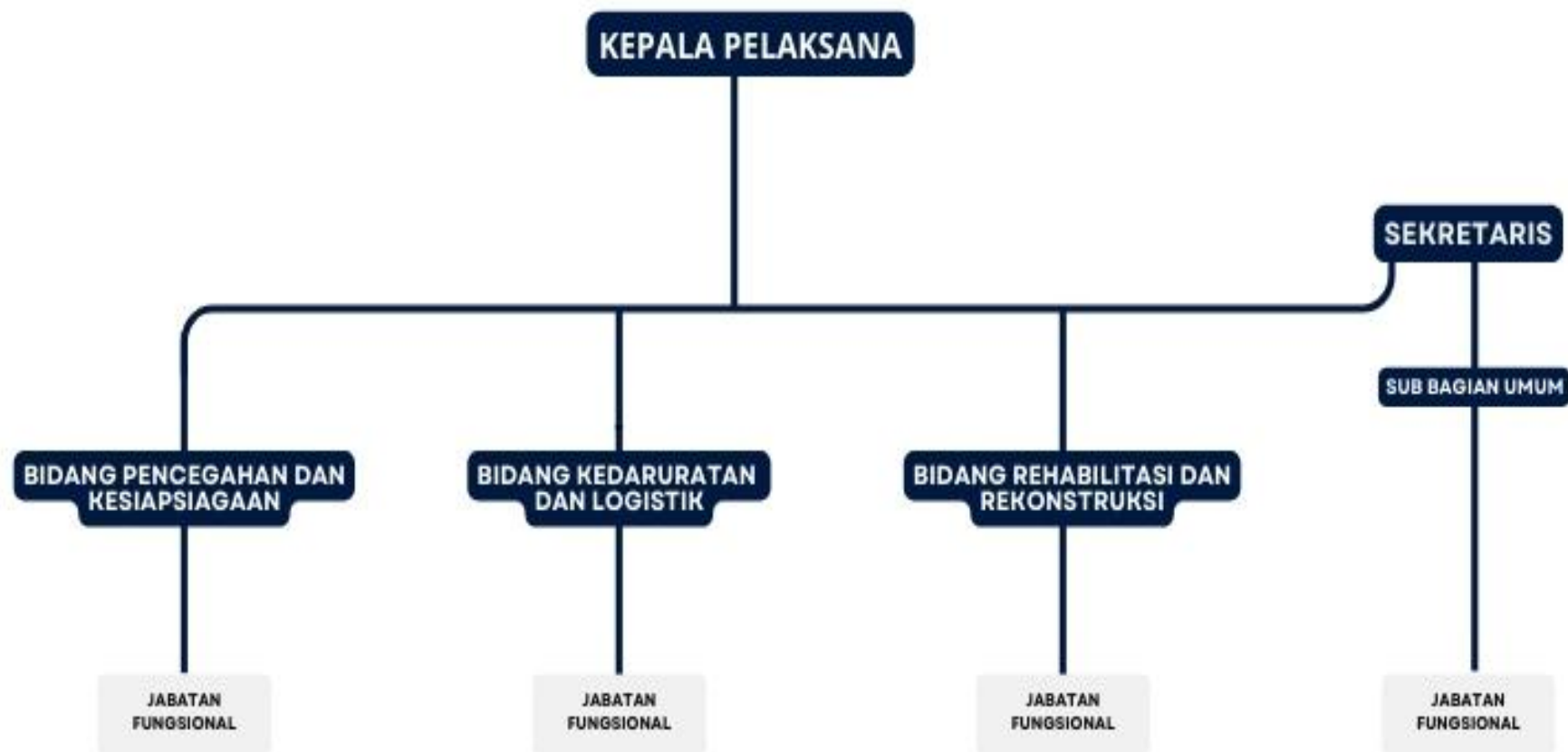
C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretaris membawahi :
 - Subbag Umum
 - Pejabat Fungsional
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - Pejabat Fungsional
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - Pejabat Fungsional

- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, membawahi :
 - Pejabat Fungsional

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur



D. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai *Non* ASN dapat dilihat pada tabel sebagai berikut per **31 Desember 2024**:

Tabel 1.1
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Pria	Wanita	Sub Total
Tenaga ASN (PNS dan PPPK)				
1	SD	0	0	0
2	SMP	0	0	0
3	SMA	6	1	7
4	D1/D3	1	1	2
5	S1/D4	21	7	28
6	S2	9	1	10
7	S3	0	0	0
Jumlah				47
Tenaga Non ASN				
1	SD	0	0	0
2	SMP	0	0	0
3	SMA	24	5	29
4	D1/D3	1	1	2
5	S1/D4	12	1	13
6	S2	0	0	0
7	S3	0	0	0
Jumlah		37	7	44
Total Keseluruhan				90

Sumber: BPBD Provinsi Kaltim, Tahun 2024

Tabel 1.2
Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
1	I	0	0	0
2	II	2	1	3
3	III	21	5	26
4	IV	9	0	9
Jumlah Total		32	6	38

Sumber: BPBD Provinsi Kaltim, Tahun 2024

Tabel 1.3
Klasifikasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
1	IX	5	4	9
Jumlah Total		5	4	9

Sumber: BPBD Provinsi Kaltim, Tahun 2024

Tabel 1.4
Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Jabatan

No.	Jenis Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Kepala Pelaksana	1	0	1
2.	Sekretaris	1	0	1
3.	Kepala Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	1	0	1
4.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	1	0	1
5.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	1	0	1
6.	Kepala Sub Bagian Umum	1	0	1
7.	Analisis Kebencanaan Ahli Madya	1	0	1
8.	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	0	1	1
9.	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	1	0	1
10.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	1	0	1
11.	Perencana Ahli Muda	2	0	2
12.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	6	0	6
13.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	1	0	1
14.	Analisis sistem informasi dan jaringan	1	0	1
15.	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0	1
16.	Pengelola <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	0	1	1
17.	Pengelola Kepegawaian	1	0	1
18.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	1	0	1
19.	Penyusun Rencana Mitigasi dan Adaptasi	1	0	1
20.	Penyiap Bahan Kegiatan Kearsipan	1	0	1

No.	Jenis Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
21.	Bendahara	0	1	1
22.	Pengadministrasi Kepegawaian	1	0	1
23.	Pengadministrasi Keuangan	0	1	1
24.	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor	1	0	1
25.	Pengadministrasi Penerimaan	1	0	1
26.	Pengadministrasi Persuratan	1	0	1
27.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	0	1
28.	Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor	1	0	1
29.	Pengadministrasi Umum	2	2	4
Jumlah Total		32	6	38

Sumber: BPBD Provinsi Kaltim, Tahun 2024

Tabel 1.5
Klasifikasi Pegawai Dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan Tingkat Jabatan

No.	Jenis Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	1	0	1
2.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	4	4	8
Jumlah Total		5	4	9

Sumber: BPBD Provinsi Kaltim, Tahun 2024

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah perangkat daerah Provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana, atas dasar antara lain;

1. Kebijakan Pemerintah berdasarkan ;
 - a. Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Karakteristik bencana yang potensi terjadi di Provinsi Kalimantan Timur seperti: Bencana Asap akibat kebakaran hutan dan lahan, bencana banjir, maupun potensi bencana lainnya;
3. Paradigma Penanggulangan bencana sebelum BPBD Provinsi Kalimantan Timur dibentuk yang menangani penanggulangan bencana hanya Sakorlak dan penanganannya hanya pada saat terjadinya bencana, dengan dibentuknya BPBD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan UU No. 4 th 2007 manajemen penanganan bencana dari pencegahan kesiapsiagaan, penanganan darurat sampai dengan pasca bencana disamping itu terjadi urusan bersama (Pemerintah, Lembaga Dunia Usaha, Masyarakat/LSM);
4. Kerusakan Sumber Daya Alam Kalimantan Timur;
5. Diperlukannya Perangkat Daerah yang mampu mengkoordinasi Perangkat Daerah terkait, lembaga dunia usaha dan masyarakat/LSM agar berjalan sesuai dengan fungsi/tupoksinya.

F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana dihadapkan dengan permasalahan yang cukup kompleks dari faktor lingkungan internal dan faktor eksternal, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Permasalahan Internal

1. Kekuatan
 - Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional di bidang penanggulangan bencana;
 - Tersedianya sarana dan prasarana penunjang keberhasilan penanggulangan bencana di dalam melakukan pelayanan publik;
 - Tersedianya sumber anggaran pada setiap tahunnya;
 - Tersedianya regulasi yang mendukung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - Dimilikinya pemimpin yang kuat, semangat dan tanggungjawab, dimana pemimpin yang memiliki semangat tentang pekerjaannya atau kehidupannya akan memotivasi anggota tim untuk bekerja lebih giat serta bertanggungjawab.

2. Kelemahan

- Lemahnya Koordinasi baik untuk antar SKPD dan antara pimpinan dengan bawahan, masih adanya keegoisan sektoral diantara bidang-bidang;
- Rendahnya komitmen dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang diembankan kepada bawahan dan belum sinergi dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan antar bidang di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Kurangnya sumber daya peralatan penanggulangan bencana baik dari jenis, kemampuan, kuantitas, dan kualitas;
- Terbatasnya SDM baik dari segi jumlah dan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan kondisi alam perubahan iklim dan cuaca, hal ini disebabkan masih lemahnya jumlah tenaga yang profesional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- Kompetensi SDM yang masih belum sesuai untuk tugas - tugas PB sehingga menyebabkan kualitas dan kapasitas personil yang ada tidak merata;
- Kurangnya lahan untuk menampung kendaraan operasional;
- Masih rendah pemberian penghargaan (*reward*) bagi sumber daya manusia yang berprestasi di bidangnya dan diperlukan pemberian sanksi (*punishment*) dari pimpinan terhadap bawahan yang dipimpinnya bagi sumberdaya manusia yang melalaikan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada bawahan;
- Belum lengkapnya standar operasional prosedur dari berbagai bidang serta belum dilaksanakan standar operasional prosedur secara utuh;
- Belum optimalnya fungsi pengawasan, *monitoring* dan evaluasi serta masih lambatnya penyampaian laporan kepada pimpinan secara berjenjang.

b. Permasalahan Eksternal

1. Peluang

- Adanya kemitraan luar negeri dalam penanggulangan bencana baik berupa manajemen kebencanaan dan penanggulangannya serta dibukanya peluang mengikutsertakan sumber daya manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengikuti program magang ke luar negeri untuk penanggulangan bencana;

- Adanya kemitraan dalam penanggulangan bencana baik dari pemerintah, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan *stakeholder* mitra penanggulangan bencana meliputi; dunia usaha, lembaga usaha masyarakat dan Forum Kaltim Peduli Bencana;
- Adanya kemudahan dalam mengakses pemanfaatan teknologi informasi kebencanaan dengan memanfaatkan *website* penanggulangan bencana;
- Adanya kepercayaan masyarakat, dukungan DPRD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penanggulangan bencana;
- Adanya program prioritas desa tangguh bencana yang menjadi program unggulan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Ancaman

- Sangat luasnya cakupan wilayah pengawasan dan fenomena alam yang sulit diprediksi;
- Beratnya medan dan susah nya akses untuk mencapai lokasi bencana mengakibatkan risiko kerja sangat tinggi;
- Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
- Masyarakat mudah terpengaruh *HOAX* (kemajuan teknologi);
- Fasilitas pendukung yang mulai beralih ke era digital;
- Eksploitasi sumber daya alam yang tidak memerhitungkan kelestarian lingkungan;
- Penggunaan dan pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur.

G. SARANA DAN PRASARANA

Penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan bencana sangat diperlukan guna mendukung kegiatan rutin maupun operasional. Sebagai institusi yang keberadaannya sangat penting, sangat diperlukan fasilitas kantor yang memadai untuk meningkatkan kinerja aparatur. Sarana dan prasarana BPBD Provinsi Kalimantan Timur berasal dari pengadaan BPBD sendiri, dari Hibah Provinsi Kalimantan Timur maupun bantuan atau hibah dari BNPB.

Prasarana dan sarana penunjang yang dimiliki oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai rencana strategi yang mencakup tujuan, sasaran serta kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2024 – 2029.

1. Tujuan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 merupakan dasar Penyusunan Kebijakan, Program, Indikator (tolok ukur kinerja) kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun mendatang (2024 – 2026) adalah dalam rangka mendukung Tujuan dan Sasaran dari Rencana Perangkat Daerah (RPD) melingkupi **Tujuan 4** “Mewujudkan Birokrasi Pemerintah berAKHLAK yang berorientasi pada Pelayanan Publik, dengan **Sasaran 11** “Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel”.

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur merumuskan tujuan dan sasaran rencana strategis untuk terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah dicanangkan dalam waktu 2024 – 2026 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.1. sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -		
					1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengurangan Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana			144,47	143,47	142,47
			Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,633	0,733	0,833

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -		
					1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			70,01 (BB)	71,00 (BB)	72,00 (BB)
			Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	70,01 (BB)	71,00 (BB)	72,00 (BB)

3. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

4. Strategi

Strategi merupakan cara yang akan dilaksanakan dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai sasarnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Sistem Strategi dan Tata Kelola Pencegahan dan Penguatan ketahanan bencana di daerah rawan bencana - Penguatan Kedaruratan dan Logistik dalam koordinasi, Dan komando penanganan darurat, serta Penguatan Tata Kelola Logistik dan Peralatan Daerah

NO	SASARAN	STRATEGI
		<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan sumber daya pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana - Penguatan Data Laporan, Informasi dan Operasional Penanggulangan Bencana
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan sistem kendali internal secara berjenjang, dipantau secara berkala - Penguatan sistem pengumpulan data capaian kinerja yang bisa dipertanggung jawabkan secara administrasi internal serta memanfaatkan hasil pengukuran - Penguatan sistem penyajian informasi kinerja, penggunaan sumber daya, untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja berkelanjutan - Penguatan sistem komunikasi kepada pihak yang berkepentingan dengan pihak terkait langsung terhadap hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti

5. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan arah tindakan yang diambil untuk menentukan setiap program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Pengurangan Risiko Bencana	Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Sistem Strategi dan Tata Kelola Pencegahan dan Penguatan ketahanan bencana di daerah rawan bencana - Penguatan Kedaruratan dan Logistik dalam koordinasi, Dan komando 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan sistem dan strategi pencegahan yang andal, Inovatif, Kolaboratif dan Implementatif dan kesiapsiagaan pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, Akademisi dan media, lembaga usaha, yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana - Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi, Penyediaan logistik dan peralatan layanan darurat bencana penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan sesuai

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>penanganan darurat, serta Penguatan Tata Kelola Logistik dan Peralatan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan sumber daya pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana - Penguatan Data Laporan, Informasi dan Operasional Penanggulangan Bencana 	<p>standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana guna mendukung pencapaian kebutuhan dasar dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas - Peningkatan layanan distribusi informasi, komunikasi dan koordinasi guna mendukung penanggulangan bencana agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien
2	Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan sistem kendali internal secara berjenjang, dipantau secara berkala - Penguatan sistem pengumpulan data capaian kinerja yang bisa dipertanggung jawabkan secara administrasi internal serta memanfaatkan hasil pengukuran - Penguatan sistem penyajian informasi kinerja, penggunaan sumber daya, untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja berkelanjutan - Penguatan sistem komunikasi kepada pihak 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan analisa perbaikan perencanaan dalam membangun kepedulian, pemahaman dan berkomitmen dalam merumuskan perencanaan kinerja - Peningkatan kepedulian/peran aktif setiap pengelola dan update dalam pengumpulan, pengukuran kinerja (PK) serta menyampaikan analisa/permasalahan/solusi pencapaian kinerja serta memberikan reward dan punishment atas capaian kinerja - Peningkatan penyajian informasi kinerja yang berkualitas, komprehensif, dan terukur terhadap realisasi anggaran, dan efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan pemanfaatan informasi untuk target kinerja tahun berikutnya - Peningkatan Evaluasi internal dilaksanakan sesuai standar, dilakukan pendalaman, dilaksanakan pada seluruh pihak yang terkait

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			yang berkepentingan dengan pihak terkait langsung terhadap hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti	

6. Program

Berikut ini adalah uraian program dan kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan maupun indikatornya mengalami perubahan. Untuk menyesuaikan perubahan tersebut dilakukanlah penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama BPBD Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebagai berikut;

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SUMBER DATA
1	Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,633	0,530	84.13	BPBD Kabupaten/Kota
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	70,01 (BB)	70.70 (BB)	100.98	LHE Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

Sumber dana penyelenggaraan program kerja tahun 2024 adalah anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 bersumber dari APBD.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan dalam merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan *punishment* atau sanksi. Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,633

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	70,01 (BB)

1. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada tahun anggaran 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) murni sebesar Rp. 28.675.866.039 Pada Anggaran perubahan 2024 BPBD Provinsi Kalimantan Timur Mendapatkan tambahan Belanja sebesar Rp. 67.516.897.245 dari pagu anggaran murni sehingga menjadi Rp. 96.192.763.284 dengan persentase kenaikan sebesar 235,60% dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja tambahan anggaran : Rp. 59.066.897.245
- Belanja aspirasi : Rp. 8.450.000.000
- Total Tambahan : Rp. 67.516.897.245

Capaian realisasi anggaran murni dan perubahan tahun 2024 adalah sebesar 94.138.948.681 (97,86%).

2. Target Dan Realisasi Belanja

Tabel 2.8

Target dan Realisasi Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2024		
		ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%
1	Belanja Operasi	93.319.902.713	91.310.093.891	97,85
2	Belanja Modal	2.872.860.571	2.828.854.790	98,46
JUMLAH		96.192.763.284	94.138.948.681	97,86

3. Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Tabel 2.9

Anggaran belanja sasaran strategis Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS & RUTIN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	73.205.884.356	72.493.051.843	99,03	Total Anggaran APBD Sebesar Rp. 94.138.948.681
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	22.986.878.928	21.645.896.838	94,17	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP TAHUN SEBELUMNYA

1. Penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2022 dan 2023

KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT (%)	HASIL PENILAIAN EVALUASI		SELISIH
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	
Perencanaan Kinerja	30,00	20,70	22,20	1,50
Pengukuran Kinerja	20,00	14,80	14,80	0,00
Pelaporan Kinerja	10,00	6,10	6,10	0,00
Evaluasi Kinerja Internal	20,00	14,00	14,00	0,00
Capaian Kinerja	20,00	11,20	13,60	2,40
Total	100,00	66,80	70,70	3,90
Predikat Penilaian			BB	

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP

Pelaksanaan Evaluasi Implementasi Sistem AKIP adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya Pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan untuk peningkatan kualitas.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh nilai 70,70 atau predikat “BB” (SANGAT BAIK). hasil Penilaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan lebih besar dari tahun 2022. Hasil tersebut kurang mampu mendorong penguatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada setiap bidang, yang terlihat dari sebagian besar hasil Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi masih menunjukkan kriteria agak kurang dan belum seluruhnya mendapatkan kriteria baik. Hal tersebut diakibatkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan yang belum berorientasikan pada hasil *core business* di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun komponen penilaian yang perlu mendapat penyempurnaan dan perbaikan yaitu:

a. Perencanaan Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK). Dokumen perencanaan tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur periode 2019 – 2023, Selain itu, untuk dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja juga mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026.

Namun masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat penetapan terhadap anggaran yang belum mengacu pada kinerja yang ingin dicapai antara lain:
 - Program Penanggulangan Bencana, pada kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana serta Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, serta Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Anggaran yang tertuang dalam dokumen RKA Perubahan 2023 pada kegiatan tersebut masih belum selaras dengan Renja Perubahan 2023, sehingga target-target kinerja sasaran dalam Renja belum sepenuhnya menjadi prasyarat dalam pengajuan, dan pengalokasian anggaran.
- 2) Rencana aksi kinerja yang dibuat tidak dilakukan pemantauan secara berkala sehingga tidak terlihat adanya perbaikan/penyempurnaan atas capaian kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

b. Pengukuran Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Perjanjian Kinerja dan rencana aksi sebagai dasar pengukuran kinerja. *Monitoring* kinerja tersebut dilakukan melalui aplikasi SIAKIP. Hal ini untuk mempermudah *monitoring* dan evaluasi pencapaian kinerja bagi pimpinan

perangkat daerah beserta bawahannya. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pedoman pemberian *reward* dan *punishment* atas Pengukuran kinerja telah dibuat, namun belum diimplemetasikan;
- 2) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar untuk penyesuaian strategi/langkah-langkah serta kebijakan dalam mencapai kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun laporan kinerja (LKjIP) Tahun 2023, telah diformalkan, direviu, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu. Disamping itu, laporan kinerja telah memberi informasi mengenai perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah, dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, serta telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja (LKjIP) diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dokumen laporan kinerja (LKjIP) belum menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Provinsi;
- 2) Dokumen Laporan Kinerja belum secara memadai menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Informasi tersebut berupa analisis perbandingan realisasi pencapaian target dengan realisasi keuangan yang dibandingkan dengan capaian dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya;
- 3) Informasi dalam laporan kinerja (LKjIP) belum sepenuhnya digunakan oleh pimpinan dalam:
 - Melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
 - Penyesuaian aktifitas untuk mencapai kinerja, digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, maupun perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal/capaian sasaran/program/kegiatan yang dilaksanakan pada seluruh bidang/sub bidang/staf dan dilaksanakan secara berjenjang.

e. Capaian Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan capaian yang lebih baik dari tahun sebelumnya, Sedangkan untuk capaian Kinerja lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah memperoleh Piagam Penghargaan di tingkat Pemerintah Provinsi.

3. Rekomendasi atas hasil evaluasi

Terhadap kondisi di atas, direkomendasikan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur beserta seluruh jajaran agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Dalam menetapkan anggaran supaya mengacu pada kinerja yang ingin dicapai;
- 2) Melakukan pemantauan atas rencana aksi kinerja secara berkala dan dilengkapi hasil laporan pemantauan/*monev*, dengan menyajikan permasalahan dan rekomendasi perbaikan dalam rangka perbaikan kinerja untuk mencapai tujuan/sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

b. Pengukuran Kinerja

Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar :

- 1) Pemberian *reward* dan *punishment*.
- 2) Penyesuaian strategi/langkah-langkah dalam mencapai kinerja baik pada level sasaran utama, sasaran program maupun sasaran kegiatan.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Dokumen laporan kinerja (LKjIP) supaya menyajikan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Provinsi;
- 2) Dokumen laporan kinerja (LKjIP) menyajikan informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja yang diperbandingkan dengan tahun sebelumnya;
- 3) Mendorong pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja (LKjIP) agar menjadi perhatian utama pimpinan, dalam:
 - Penyesuaian aktifitas dan penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja;
 - Melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dalam rangka upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) yang selanjutnya digunakan untuk penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya, sehingga informasi kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Capaian Kinerja

Capaian kinerja agar lebih aktif dan inovatif dalam peningkatan kinerjanya.

Tabel 3.2

Tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil evaluasi terhadap implementasi sistem AKIP Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	OUTPUT	TARGET WAKTU
PERENCANAAN KINERJA				
1	Dalam menetapkan anggaran supaya mengacu pada kinerja yang ingin dicapai	Memperkuat basis data (analisis kebutuhan) sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja	Laporan	Triwulan IV
2	Melakukan pemantauan atas rencana aksi kinerja secara berkala dan dilengkapi hasil laporan pemantauan/ <i>monev</i> , dengan menyajikan permasalahan dan rekomendasi perbaikan dalam rangka perbaikan	Melakukan rapat secara berkala dalam mengukur capaian kinerja (secara per triwulan) dengan memuat permasalahan, solusi pemecahan, dan rekomendasi perbaikan serta membuat komitmen penyelesaian	Laporan	Per Triwulan

NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	OUTPUT	TARGET WAKTU
	kinerja untuk mencapai tujuan/sasaran organisasi yang telah ditetapkan.			
PENGUKURAN KINERJA				
1	Pemberian <i>Reward</i> and <i>Punishment</i>	Akan membentuk tim penilai kinerja pegawai ASN dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	Piagam Penghargaan	Akhir Triwulan IV
2	Penyesuaian strategi/langkah – langkah dalam mencapai kinerja baik pada level sasaran utama, sasaran program maupun sasaran kegiatan	Melakukan evaluasi capaian indikator sasaran, program, dan kegiatan per triwulan	Laporan Evaluasi Per Triwulan	Per Triwulan
PELAPORAN KINERJA				
1	Dokumen laporan kinerja (LKjIP) supaya menyajikan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Provinsi	Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan beberapa Perangkat daerah lainnya tingkat Provinsi pada Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Laporan LKjIP Tahun 2024	Februari 2025
2	Dokumen laporan kinerja (LKjIP) menyajikan informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja yang diperbandingkan dengan tahun sebelumnya	Kedepannya Laporan kinerja (LKjIP) akan menyajikan informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya capaian kinerja selama 3 tahun terakhir	Laporan LKjIP Tahun 2024	Februari 2025

NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	OUTPUT	TARGET WAKTU
3	<p>Mendorong pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja (LKJIP) agar menjadi perhatian utama pimpinan, dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyesuaian aktifitas dan penggunaan anggaran dalam rangka mencapai kinerja - Melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dalam rangka upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) yang selanjutnya digunakan untuk penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya, sehingga informasi kinerja dapat mempengaruhi perubahan kinerja organisasi 	BPBD telah melakukan perbaikan dan penyempurnaan kinerja dengan menyempurnakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Sasaran dan Program di dalam Rencana Strategi tahun 2024 - 2026	Laporan LKJIP Tahun 2024	Februari 2025
CAPAIAN KINERJA				
1	Capaian kinerja agar lebih aktif dan inovatif dalam peningkatan kinerjanya	BPBD telah melakukan upaya peningkatan kinerja melalui kerja sama antar lembaga dan masyarakat baik lingkup provinsi maupun lintas daerah untuk memaksimalkan kinerja penanggulangan bencana atas keterbatasan anggaran	SK, MoU, dan Laporan	Akhir Triwulan IV

- 1. REKOMENDASI** : Dalam menetapkan anggaran supaya mengacu pada kinerja yang ingin dicapai

HASIL TINDAK LANJUT : - Mengevaluasi capaian kinerja berdasarkan hasil perhitungan Indeks Ketahanan Daerah.

- Target anggaran yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan antara Provinsi dengan 10 Kabupaten/Kota terhadap komitmen pembangunan penanggulangan bencana pada 7 fokus prioritas yang ke dalam berita acara kesepakatan.
- 2. REKOMENDASI** : Melakukan pemantauan atas rencana aksi kinerja secara berkala dan dilengkapi hasil laporan pemantauan/*monev*, dengan menyajikan permasalahan dan rekomendasi perbaikan dalam rangka perbaikan kinerja untuk mencapai tujuan/sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

HASIL TINDAK LANJUT : - Pengukuran capaian kinerja dilakukan dilakukan per triwulan dengan tujuan mengetahui capaian *output* dan anggaran termasuk faktor penghambat dan faktor pendorong.

- Evaluasi dan monitoring capaian kinerja menjadi bahan bagi pimpinan untuk menetapkan target selanjutnya.
- 3. REKOMENDASI** : Pemberian *Reward* and *Punishment*

HASIL TINDAK LANJUT : - Membentuk tim penilai dari kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian

- Penilaian dilakukan berdasarkan pedoman/juknis yang telah dibuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

- Kepala Pelaksana menetapkan pegawai penerima *reward* dari rekomendasi dari tim penilai

- Untuk punishment dilaksanakan sesuai Undang – Undang/peraturan yang berlaku

- 4. REKOMENDASI** : Penyesuaian strategi/langkah – langkah dalam mencapai kinerja baik pada level sasaran utama, sasaran program maupun sasaran kegiatan
- HASIL TINDAK LANJUT** : - Menyusun Rencana Strategis mengacu pada capaian Indeks Ketahanan Daerah pada 10 Kabupaten/Kota
- 5. REKOMENDASI** : Dokumen laporan kinerja (LKjIP) supaya menyajikan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level provinsi
- HASIL TINDAK LANJUT** : - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah memuat data perbandingan realisasi capaian kinerja dengan realisasi keuangan dengan 3 tahun terakhir
- 6. REKOMENDASI** : Dokumen laporan kinerja (LKjIP) menyajikan informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja yang diperbandingkan dengan tahun sebelumnya
- HASIL TINDAK LANJUT** : - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah memuat data perbandingan realisasi capain kinerja dengan realisasi keuangan dengan 3 tahun terakhir
- 7. REKOMENDASI** : Mendorong pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja (LKJiP) agar menjadi perhatian utama pimpinan, dalam :
- Penyesuaian aktifitas dan penggunaan anggaran dalam rangka mencapai kinerja
 - Melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dalam rangka upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) yang selanjutnya digunakan untuk penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya, sehingga informasi kinerja dapat mempengaruhi perubahan kinerja organisasi
- HASIL TINDAK LANJUT** : - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah memuat data perbandingan realisasi capain kinerja dengan realisasi keuangan dengan 3 tahun terakhir.

- Evaluasi dan monitoring capaian kinerja menjadi bahan bagi pimpinan untuk menetapkan target selanjutnya.

8. REKOMENDASI : Capaian kinerja agar lebih aktif dan inovatif dalam peningkatan kinerjanya

HASIL TINDAK LANJUT : - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan penguatan kapasitas daerah melalui skema kerja sama antar pemerintah, kelompok, dan masyarakat atas keterbatasan anggaran.

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,633	Triwulan I	0	0	0
					Triwulan II	0	0	0
					Triwulan III	0	0	0
					Triwulan IV	0,633	0,530	84,13
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	70,01 (BB)	Triwulan I	0	0	0
					Triwulan II	0	0	0
					Triwulan III	70,01	70,70	100,98
					Triwulan IV	0	0	0

Tabel 3.4
Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021 – 2024

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2024 (APBD)		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
			K	RP				K	RP			K	RP
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85 Indeks	22.986.878.928	-	-	-	86,60	21.645.896.838	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	101,88	94,17
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	80 %		-	-	-	100		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	125	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Yang Ditetapkan Tepat Waktu	100 %	1.385.566.520	100	100	100	100	1.317.619.297	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	95,10
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	308.852.520	10	10	10	6	297.110.633	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	96,20
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	51.230.000	-	-	-	1	43.760.200	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	85,42
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	42.160.000	-	-	-	1	35.075.680	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	83,20
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	3.620.000	-	-	-	1	3.033.600	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	83,80

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2024 (APBD)		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
			K	RP				K	RP			K	RP
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
		Penyusunan Dokumen DPA-SKPD											
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.540.000	-	-	-	1	2.959.800	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	83,61
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	495.614.000	5	5	5	6	477.714.266	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	96,39
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	480.550.000	3	3	3	3	457.965.118	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	95,30
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	12.801.082.901	100	100	100	100	12.116.974.705	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	94,66
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/Bulan	12.160.274.781	12 Lap	12 Lap	43	49	11.485.575.899	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	113,95	94,45
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	343.470.000	12	12	12	12	339.760.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	98,92

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2024 (APBD)		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
			K	RP				K	RP			K	RP
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	99.252.400	-	-	12	12	97.484.800	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	98,22
1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	124.689.300	-	-	12	12	123.878.961	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,35
1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	27.639.640	-	-	-	12	26.543.700	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	96,03
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	26.379.380	-	-	-	12	26.106.845	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	98,97
1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	19.377.400	-	-	-	12	17.624.500	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	90,95
1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	69.182.000	100	100	100	100	68.086.800	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	32,38
1.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.712.000	-	-	-	1	2.712.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	100

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2024 (APBD)		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
			K	RP				K	RP			K	RP
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	59.820.000	-	-	-	1	58.724.800	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	98,17
1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.650.000	-	-	-	1	6.650.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	100
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	292.324.424	100	100	100	100	0	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	97,16
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	500.000	75	75	7	0	500.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	0	100
1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	2.712.000	-	-	-	4	2.712.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	100
1.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2.712.000	-	-	-	2	1.512.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	55,75
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	112.212.624	-	-	-	18	107.762.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	96,03
1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	174.187.800	-	-	-	25	171.540.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	98,48

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2024 (APBD)		Re ali sa si 20 21	Re ali sa si 20 22	Re ali sa si 20 23	Realisasi 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan IV				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	1.476.561.407	100	100	100	100	1.435.237.088	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	97,20
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.481.884	-	-	-	1	9.471.900	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,89
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	149.499.388	10 unit	10 unit	18	10	146.032.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	97,68
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket	327.210.183	12 Lap	12 Lap	12 Lap	22	304.716.804	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	93,13
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	70.286.400	-	-	-	7	70.156.025	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,81
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145 Laporan	788.088.000	262	262	184	145	787.806.459	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,96
1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	124.795.312	-	-	-	6	117.044.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	93,79
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	100 %	1.854.819.744	100	100	100	100	1.853.825.600	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,95

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2024 (APBD)		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
			K	RP				K	RP			K	RP
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
		Dinas Jabatan yang Disediakan											
1.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	20.000	-	-	-	0	10.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	0	50
1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	1.854.799.744	-	-	-	5	1.853.815.600	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,95
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor	100 %	4.281.672.032	100	100	100	100	3.777.042.920	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	88,21
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.590.000	-	-	-	1	1.590.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	100
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	574.425.900	12	12	12	12	382.912.188	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	66,66
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.705.656.132	12	12	12	12	3.392.540.732	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	91,55
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	825.669.900	100	100	100	100	793.084.428	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	96,05

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2024 (APBD)		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
			K	RP				K	RP			K	RP
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	477.619.000	21	21	10	44	458.953.588	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	96,09
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	82.662.900	64	64	50	173	82.573.400	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,89
1.05.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	12.498.000	-	-	-	2	12.210.000	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	97,70
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	252.890.000	1701 m2	1701 m2	8	1	239.347.440	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	94,64
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 %	73.205.884.356	-	-	-	100	72.493.051.843	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,03
		Persentase Pemulihan Pasca Bencana	100 %		-	-	-	100		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	
		Persentase Penanganan Pra Bencana	100 %		-	-	-	100		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pagu 2024 (APBD)		Re ali sa si 20 21	Re ali sa si 20 22	Re ali sa si 20 23	Realisasi 2024		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024	
								Triwulan IV				K	RP
			K	RP									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Tersedianya fasilitator KIE di setiap Kabupaten/Kota	100 %	168.400.000	100	88,76	100	100	166.166.928	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	98,67
1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	20 Orang	168.400.000	-	-	-	20	166.166.928	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	98,67
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	41.648.627.356	100	80	100	38,46	41.232.485.091	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,00
1.05.03.1.02.0012	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	1 Dokumen	127.235.000	-	-	-	1	116.514.180	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	91,57
1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategisKabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan	311.400.000	4 Desa/ Kelurahan	4 Desa/ Kelurahan	13	2	309.453.619	Pelaksanaan belum dilaksanakan pada akhir september	Akan dilaksanakan pada bulan oktober	100	99,37

1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan danmendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	13 Dokumen	40.336.610.356	12	12 Lap	12 dokumen	13	39.977.474.161	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,11
1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	254.600.000	30	30	120	30	238.891.002	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	93,83
1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yangmeningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	20 Orang	187.000.000	-	-	-	20	172.638.360	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	92,32
1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaanmenge tahu dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	400 Orang	190.600.000	-	-	2	400	176.816.564	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	92,77
1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang	60 Unit	241.182.000	-	-	984 2	60	240.697.205	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,80

		memperoleh peralatan perlindungan diridan kesiapsiagaan terhadap bencana											
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	1.508.860.000	100	100	100	100	1.384.053.735	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	91,73
1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	10 Laporan	418.400.000	12	12	12	10	416.307.169	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,50
1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Laporan	271.548.423	-	-	-	12	166.840.500	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	61,44
1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	818.911.577	12	12	100 0	800	800.906.066	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	97,80
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	2.871.597.000	79,36	79,36	100	100	29.710.346.089	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,43
1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga	108.818.000	-	-	-	60	101.169.135	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	92,97
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana (R3P) yang Disusun	6 Dokumen	28.778.000.000	3 Lap	3 Lap	2	6	28.713.896.965	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	99,78

1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	107.400.000	-	-	-	1	104.263.965	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	97,08
1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	182.200.000	-	-	1	1	153.923.880	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	84,48
1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalikan	2 Dokumen	239.600.000	-	-	2	2	218.363.397	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	1000	91,14
1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan(pra, saat dan pascabencana)	2 Dokumen	90.600.000	-	-	-	2	82.314.856	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	90,86
1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	10 Kab/Kota	373.379.000	-	-	-	10	336.413.891	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	100	90,10
GRAND TOTAL				96.192.763.284					94.138.948.681			97,82	97,86

Dari ringkasan capaian kinerja beberapa sasaran di atas dapat dilihat bahwa ada sasaran yang telah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, namun ada pula sasaran yang realisasi atau capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

C. Analisa Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2024, analisis pencapaian kinerja, keberhasilan/kegagalan, hambatan/ kendala yang dihadapi akan diuraikan sebagai berikut:

1. SASARAN Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Sasaran Strategis :
Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana arah kebijakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai Tujuan dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai IKD 10 Kabupaten/Kota}}{\sum \text{Total Kabupaten/Kota se – kaltim}}$$

Tabel 3.5
Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINIERJA	SATUAN	TARGET 2024	TAHUN 2024	
				REALISASI	% CAPAIAN
1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,633	0,530	84,13

Tabel 3.6
Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021 – 2024	REALISASI				% Peningkatan / Penurunan Tahun 2024
				2021	2022	2023	2024	
1	Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	%	85	98.04	-	-	-	Penurunan
			85	-	100	-	-	20.00
			85	-	-	100	-	00.00
2	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,633	-	-	-	0,530	Penurunan

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Antar Provinsi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALIASI	TINGKAT PENCAPAIAN
Provinsi Kalimantan Timur					
1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,633	0,530	84,13
Provinsi Bali					
2	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,520	0,625	120,20

Tabel 3.8
Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap target akhir RENSTRA

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALIASI 2024	TINGKAT PENCAPAIAN
1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,633	0,530	84,13

a. Analisa Kinerja

Capaian Sasaran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur belum mencapai target yang telah ditetapkan sebagaimana mengacu pada dokumen Renstra tahun 2024 – 2026, namun secara kalkulasi perhitungan capaian tujuan strategis telah tercapai, sehingga mengakibatkan tidak konsistennya perhitungan antara target tujuan dengan target sasaran dikarenakan adanya ketidakepatan pada saat melakukan analisis rumusan.

Proyeksi rumusan masih menggunakan asumsi, dimana jika Indeks Ketahanan Daerah (IKD) mengalami kenaikan 0.1 poin, maka Indeks Risiko Bencana (IRB) mengalami penurunan 1 poin, yang pada akhirnya target yang ditetapkan tidak mempunyai kesesuaian antara tujuan dengan sasaran strategi didalam melaksanakan Penanggulangan bencana.

b. Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan tabel. 3.8 bahwa Indeks Ketahanan Daerah (IKD) hanya mencapai 84,13 %. Capaian ini merupakan hasil dari pemenuhan kapasitas Penanggulangan Bencana di 10 Kabupaten/Kota, dan apabila dikonversi dalam Indeks Risiko Bencana (IRB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mampu menurunkan hingga 8,36 *point* dari target strategis yang semula sebesar 144,47 *point* menjadi 136,11 *point*, atau mencapai penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 8,32 *point*, atau dengan kata lain bahwa provinsi Kalimantan timur sebelumnya masih berada pada zona tinggi ditahun 2023 dan pada tahun 2024 telah berada pada zona/wilayah sedang terhadap risiko bencana.

c. Kendala

Hambatan dalam mencapai sasaran kinerja melingkupi arah kebijakan daerah dan administrasi, antara lain:

1. Penanggulangan Bencana merupakan urusan bersama, maka peran aktif penanganan (pra, saat dan pasca), tidak hanya menjadi tanggung jawab kepada salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi saja, tetapi melibatkan perangkat daerah terkait dan *stakeholder* lainnya.
2. Pembangunan pada daerah rawan bencana yang belum sepenuhnya berbasis pengurangan risiko bencana dapat berpotensi menimbulkan berbagai bencana.
3. Belum optimalnya dalam melakukan Penilaian dan Evaluasi Indeks Ketahanan Daerah (IKD).
4. Belum tepatnya target sasaran yang mempunyai kesesuaian antara tujuan dengan sasaran strategi didalam melaksanakan Penanggulangan bencana.

d. Alternatif Solusi

Alternatif solusi dalam mencapai sasaran kinerja antara lain:

1. Membentuk sinergitas dan komitmen antar Pemerintah Daerah dan *Stakeholder* lainnya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Memperkuat Analisis Risiko Bencana sebagai dasar dalam perencanaan Pembangunan daerah.
3. Memperkuat pendokumentasian sebagai implementasi pelaksanaan kegiatan di daerah.
4. Sebagai arah kebijakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2025 – 2029, telah melakukan *review* indikator tujuan, sasaran, program dan kegiatan termasuk dalam menetapkan target indikator tersebut.

Tabel 3.9
Tingkat Efisiensi Penyerapan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	% CAPAIAN	% PENYERAPAN ANGGARAN	Tingkat Efisiensi (=capaian/penyerapan anggaran)
1	Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	84,13	99,03	0,85

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Efisiensi	%	Jumlah Program / Kegiatan yang dialokasikan		Total Program / Kegiatan		Ket
					Pro Ram	Kegiatan	Pro ram	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021	3.013.732.010	2.395.860.262	617.871.748	20,50	1	4	1	4	-
2022	4.013.345.907	3.843.054.179	170.291.728	4,24	1	4	1	4	-
2023	38.777.112.260	38.247.872.677	529.239.583	1,36	1	4	1	4	-
2024	73.205.884.356	72.493.051.843	712.832.513	0,97	1	4	1	4	-

e. Program yang menunjang keberhasilan

Pada sasaran ini dicapai dengan “Program Penanggulangan Bencana” dimana program ini mempunyai tiga indikator yaitu Persentase Penanganan Pra

Bencana, Persentase Penanganan Tanggap Darurat, dan Persentase Penanganan Pemulihan Pasca Bencana.

Pada tabel. 3.9, bahwa besaran alokasi penanggulangan bencana setiap tahun mengalami kenaikan, sehingga memberikan nilai positif bagi penguatan kapasitas pada setiap daerah, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur mampu mengoptimalkan tugas pendampingan atau percepatan, serta bantuan sebagai koordinator.

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Antar Provinsi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALIASI	TINGKAT PENCAPAIAN
Provinsi Kalimantan Timur					
1	Persentase Penanganan Pra Bencana	%	100	100	100
2	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100
3	Persentase Pemulihan Pasca Bencana	%	100	100	100
Provinsi Bali					
1	Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	%	3	3	100
2	Persentase Penanganan Darurat Bencana	%	100	100	100
3	Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Bencana	%	100	100	100

A. Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam pencapaian indikator pada program diatas didukung dengan empat kegiatan yaitu :

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi

Kegiatan ini mempunyai satu sub kegiatan yaitu Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana). Sub kegiatan tersebut merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Kalimantan Timur dan juga memberikan penguatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada **indikator 14** “Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat” dan

indikator 15 “Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana pada setiap kecamatan di wilayahnya”. Pada tahun 2024 telah dilakukan penganggaran dalam DPA sebesar Rp. 168.400.000 dengan realisasi sebesar Rp. 166.166.928 atau mencapai 98,67%. Dalam pelaksanaan sub kegiatan berupa sosialisasi tentang mekanisme penyampaian informasi kebencanaan melibatkan Perangkat Daerah terkait termasuk kelompok relawan dan Masyarakat.



Gambar 3.1 Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi

2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Dalam pelaksanaan kegiatan ini berfokus pada kebijakan, pengembangan sistem informasi dan diklat, penanganan tematik kawasan, dan perkuatan kesiapsiagaan bencana. Kegiatan ini merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Kalimantan Timur dan memberikan penguatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada **indikator 13** “Rencana Penanggulangan Bencana Daerah”, **indikator 15** “Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya”, **indikator 20** “Penyelenggaraan Latihan (gladi) Kesiapsiagaan”, **indikator 22** “Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan”, **indikator 31** “Desa Tangguh Bencana”, **indikator 63** “Pengerahan Tim Kaji Cepat ke

lokasi bencana”. Pada tahun 2024 telah dilakukan penganggaran dalam DPA sebesar Rp. 41.648.627.356 dengan realisasi sebesar Rp. 41.232.485.091 atau mencapai 99,00%.



Gambar 3.2 Pelaksanaan Koordinasi Teknis Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 3.3 Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2024



Gambar 3.4 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Dalam pelaksanaan kegiatan ini berfokus pada pengadaan logistik, dan penanganan bencana. Kegiatan ini merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Kalimantan Timur dan memberikan penguatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada **indikator 22** “Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan”, **indikator 63** “Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana”, dan **indikator 64** “Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana”. Pada tahun 2024 telah dilakukan penganggaran dalam DPA sebesar Rp. 1.508.860.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.384.053.735 atau mencapai 91,73%.



Gambar 3.5 Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Banjir di Kabupaten Paser



Gambar 3.6 Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Dapur Umum untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Banjir di Kabupaten Paser

4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana berfokus pada penyusunan dan implementasi rencana secara komprehensif dalam menghadapi berbagai jenis bencana alam atau buatan manusia dalam bentuk kesiapsiagaan, respon, pemulihan, dan mitigasi. Salah satu *output*

yang telah dilaksanakan adalah dengan melakukan *review* Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Kegiatan ini juga menjadi penguatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Pada tahun 2024 telah dilakukan penganggaran dalam DPA sebesar Rp. 29.879.997.000 dengan realisasi sebesar Rp. 29.710.346.089 atau mencapai 99,43%.



Gambar 3.7 Asistensi Pemproperda Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka Pengusulan Perda Penanggulangan Bencana Karhutla Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 3.8 Pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan



Gambar 3.9 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) di Kabupaten Kutai Timur



Gambar 3.10 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 3.11 Dokumentasi Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

2. SASARAN Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah

Sasaran Strategis :

Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan tentang terlaksananya akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang baik.

Indikator sasaran ini adalah “Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”. Yang dimaksud dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah hasil dari penilaian Inspektur Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk menghitung realisasi atas indikator ini adalah menggunakan cara perhitungan sebagai berikut:

Hasil Perencanaan Kinerja + Hasil Pengukuran Kinerja + Hasil Pelaporan Kinerja + Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal + Hasil Capaian Kinerja

Tabel 3.12
Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINIERJA	SATUAN	TARGET 2024	TAHUN 2024	
				REALISASI	% CAPAIAN
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Poin	70,01 (BB)	70,70 (BB)	100,98

Tabel 3.13
Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021 – 2024	REALISASI				% Peningkatan / Penurunan Tahun 2024
				2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	78,37	-	-	-	Peningkatan
			80	-	80,46	-	-	Peningkatan
			80	-	-	82,89	-	Peningkatan
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Poin	70,01 (BB)	-	-	-	70,70 (BB)	Peningkatan

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Antar Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALIASI	TINGKAT PENCAPAIAN
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur					
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Poin	70,01	70,70	100,98

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALIASI	TINGKAT PENCAPAIAN
Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam					
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Poin	77,25	76,40	98,90

Tabel 3.15
Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALIASI 2024	TINGKAT PENCAPAIAN
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Poin	70,01 (BB)	70,70 (BB)	100,98

a. Analisa Kinerja

Capaian Sasaran kinerja sebagaimana pada tabel 3.15, bahwa BPBD Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan, dimana BPBD Provinsi Kalimantan Timur mampu meningkatkan nilai implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Kategori Baik (B) menjadi Sangat Baik (BB).

b. Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan BPBD Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja, didorong oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

1. Mampu mengevaluasi capaian kinerja secara berkala (setiap triwulan)
2. Mampu mengevaluasi target kinerja pada level sasaran dan Program
3. Mampu meningkatkan komitmen para aparatur untuk melengkapi administrasi kinerja
4. Memberikan kinerja terbaik dengan memberikan *reward*.

Tabel 3.16
Tingkat Efisiensi Penyerapan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	% CAPAIAN	% PENYERAPAN ANGGARAN	Tingkat Efisiensi (=capaian/penyerapan anggaran)
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	100,98	94,17	1,07

Tabel 3.17
Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Efisiensi	%	Jumlah Program / Kegiatan yang dialokasikan		Total Program / Kegiatan		Ket
					Pro ram	Keg iat an	Pro ram	Keg iat an	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12
2021	12,661,749,990	10,750,461,267	1,911,288,723	15,10	1	6	1	6	-
2022	14,466,946,420	12,481,797,782	1,985,148,638	13,72	1	4	1	4	-
2023	19.518.548.419	18.390.131.258	1,128,417,161	5,78	1	6	1	6	-
2024	22.986.878.928	21.645.896.838	1.340.982.090	5,83	1	8	1	8	-

c. Program yang menunjang keberhasilan

Pada sasaran ini dicapai dengan “Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi” dimana program ini memiliki dua indikator yaitu Indeks Layanan Sekretariat dan Persentase Layanan yang ditindaklanjuti.

Pada tabel. 3.15, bahwa penunjang keberhasilan capaian kinerja tersebut melingkupi seluruh unsur tingkat Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian serta Barang Milik Daerah, dimana target indikator tersebut mampu dicapai dengan persentase sebesar 101,88% dan Indikator Persentase Layanan yang ditindaklanjuti mencapai 125,00%.

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Antar Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALIASI	TINGKAT PENCAPAIAN
Provinsi Kalimantan Timur					
1	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	85	86	101,88
2	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	80	100	125,00
Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam					
1	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	85	98,4	115,76
2	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	80	100	125,00

A. Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam pencapaian indikator pada program diatas didukung dengan delapan kegiatan yaitu:

1) Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dalam kegiatan ini tidak saja menitikberatkan pada pemenuhan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan, namun juga memperkuat kebijakan perencanaan melalui kegiatan evaluasi antara lain:

1. Kegiatan Resiliensi Penanggulangan Bencana Wilayah Kalimantan
2. Kegiatan Penilaian Panji Keberhasilan ARINDAMA UTAMA Aspek Penanggulangan Bencana
3. Kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Se-Kalimantan Timur

4. Kegiatan Diskusi Terpumpun Evaluasi Capaian Kinerja Penanggulangan Bencana.

Pada tahun 2024, telah dilakukan penganggaran dalam DPA sebesar Rp. 1.385.566.520 dengan realisasi sebesar Rp. 1.317.619.297 atau mencapai 95,10%.



Gambar 3.12 Pelaksanaan Kegiatan Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025



Gambar 3.13 Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana Se – Kalimantan Timur Tahun 2024



Gambar 3.14 Pelaksanaan Kegiatan Resiliensi Penanggulangan Bencana Wilayah Kalimantan Tahun 2024

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dalam kegiatan ini memfokuskan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan layanan administrasi keuangan. Pada tahun 2024 telah dilakukan penganggaran dalam DPA sebesar Rp. 12.801.082.901 dengan realisasi sebesar Rp. 12.116.974.705 atau mencapai 94,66%.

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Dalam kegiatan ini memfokuskan pada Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Pada tahun 2024 telah dilakukan penganggaran dalam DPA sebesar Rp. 12.801.082.901 dengan realisasi sebesar Rp. 12.116.974.705 atau mencapai 94,66%.

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dalam kegiatan ini memfokuskan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Pada tahun 2024 telah dilakukan penganggaran dalam DPA sebesar Rp. 292.324.424 dengan realisasi sebesar Rp. 284.026.000 atau mencapai 97,16%.



Gambar 3.15 Mengikuti Kegiatan *Basic Drone Operation & Mapping Remote Pilot Certification Training*

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dalam kegiatan ini memfokuskan pada Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor. Pada tahun 2024 telah dilakukan penganggaran dalam DPA sebesar Rp. 1.476.561.407 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.435.237.088 atau mencapai 97,20%.

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dalam kegiatan ini memfokuskan pada Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan. Pada tahun 2024 telah dilakukan penganggaran dalam DPA sebesar Rp. 1.854.819.744 dengan realisasi sebesar Rp. 1.853.825.600 atau mencapai 99,95%.



Gambar 3.16 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dalam kegiatan ini memfokuskan pada Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor. Pada tahun 2024 telah dilakukan penganggaran dalam DPA sebesar Rp. 4.281.672.032 dengan realisasi sebesar Rp. 3.777.042.920 atau mencapai 88,21%.

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dalam kegiatan ini memfokuskan pada Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik. Pada tahun 2024 telah dilakukan penganggaran dalam DPA sebesar Rp. 825.669.900 dengan realisasi sebesar Rp. 793.084.428 atau mencapai 96,05%.

D. REALISASI ANGGARAN

Realisasi keuangan dalam mencapai sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PROGRAM	ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,633	0,530	84,13	Program Penanggulangan Bencana	73.205.884.356	72.493.051.843	99,03
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	70,01 (BB)	70,70 (BB)	100,98	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.986.878.928	21.645.896.838	94,17

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

Dilihat dari pencapaian kinerja baik pada level Sasaran, Program, kegiatan dan sub kegiatan terdapat indikator yang telah memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi ada juga yang masih belum dapat memenuhi target masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Ada beberapa catatan dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian yang harus ditindaklanjuti:

1. Dalam menetapkan anggaran supaya mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.
2. Melakukan pemantauan atas rencana aksi kinerja secara berkala dan dilengkapi hasil laporan pemantauan/monev, dengan menyajikan permasalahan dan rekomendasi perbaikan dalam rangka perbaikan kinerja untuk mencapai tujuan/sasaran organisasi yang telah ditetapkan.
3. Pemberian *Reward and Punishment*.
4. Penyesuaian strategi/langkah – langkah dalam mencapai kinerja baik pada level sasaran utama, sasaran program maupun sasaran kegiatan.
5. Dokumen laporan kinerja (LKjIP) supaya menyajikan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level provinsi.
6. Dokumen laporan kinerja (LKjIP) menyajikan informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja yang diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Mendorong pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja (LKjIP) agar menjadi perhatian utama pimpinan, dalam:
 - Penyesuaian aktifitas dan penggunaan anggaran dalam rangka mencapai kinerja.
 - Melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dalam rangka upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) yang selanjutnya digunakan untuk penyesuaian perencanaan kinerja

berikutnya, sehingga informasi kinerja dapat mempengaruhi perubahan kinerja organisasi.

8. Capaian kinerja agar lebih aktif dan inovatif dalam peningkatan kinerjanya.

B. LANGKAH KEDEPAN

Kedepannya Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur bertekad dan berupaya penuh untuk mencapai target – target yang telah ditetapkan di dalam RENSTRA dan RENJA.

C. SARAN

Kami menyadari bahwa LKjIP ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, diharapkan masukan dari berbagai pihak guna perbaikan pembuatan laporan pada tahun mendatang. Kepada pihak – pihak yang terkait dan terlibat dalam penyusunan LAKIP ini kami ucapkan terima kasih.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- 1

Nama Unit Organisasi

:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur
- 2

Tugas

:

a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil, setara dan tepat sasaran;

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan (uang dan barang) bencana;

g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3

Fungsi

:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.

b. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

c. Pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan bencana.
- 4

Indikator Kinerja Utama

:

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	$\frac{\text{Nilai IKD 10 Kab/Kota}}{\Sigma \text{ Total Kab/Kota se-Kaltim}}$	Data BPBD Prov. Kaltim Data BPBD Kab/kota	Kepala Pelaksana BPBD Prov. Kaltim
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	Nilai (Perencanaan kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja)	LHE Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur	Kepala Pelaksana BPBD Prov. Kaltim

Samarinda, Oktober 2023

Kepala Pelaksana,

Drs. Agus Tianur, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196508141998031006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jalan M.T. Haryono, Telp. 0541-733766, 741040, Fax. 0541-205315
Email : bpbdkaltim@gmail.com pusdalopsbpbdkaltim@yahoo.co.id Website : bpbdkaltim.com Call/SMS Center : 0811 5844 4722
SAMARINDA, 75124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. Agus Tianur, M.Si**
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Prov. Kaltim
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
Nama : **Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si**
Jabatan : Pj. Gubernur Kalimantan Timur
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. Gubernur Kalimantan Timur


Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si

PIHAK PERTAMA ,
Kepala Pelaksana


Drs. Agus Tianur, M.Si
Pembina utama Muda
NIP. 196508141998031006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. KALTIM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Peningkatkan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.633
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	70.01

Program	Anggaran	Keterangan
1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 21,293,936,351	APBD
2 Penanggulangan Bencana	Rp 7,381,929,688	APBD

Samarinda, Januari 2024

Pihak Kedua
PJ. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si

Pihak Pertama
KEPALA PELAKSANA,


Drs. Agus Tianur, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508141998031006



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. Agus Tianur, M.Si**
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Prov. Kaltim
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
Nama : **Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si**
Jabatan : Pj. Gubernur Kalimantan Timur
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. Gubernur Kalimantan Timur

Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si

PIHAK PERTAMA,
Kepala Pelaksana

Drs. Agus Tianur, M.Si
Pembina utama Muda
NIP. 196508141998031006

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. KALTIM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Peningkatkan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.633
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	70.01

Program	Anggaran	Keterangan
1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 22,986,878,928	APBD-P
2 Penanggulangan Bencana	Rp 73,205,884,356	APBD-P

Samarinda, Oktober 2024

Pihak Kedua
PJ. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si



Pihak Pertama
KEPALA PELAKSANA,


Drs. Agus Tianur, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508141998031006












PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN)

<div></div> <div>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</div>	Nomor SOP	01/Sekretariat/BPBD
	Tanggal Pembuatan	01 September 2014
	Tanggal Revisi	21 Februari 2023
	Tanggal Efektif	07 Maret 2023
	Disahkan oleh	<div><div></div><div>Kepala Pelaksana</div></div> <div>H.M. Agus Hari Kesuma, SE, MM, M.Si NIP. 19670817 199203 1 017</div>
<div>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN)</div>	Nama SOP	Penyusunan Dokumen LKJIP/LAKIP
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. PP No. 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	1. Memahami Pedoman Penyusunan dokumen Perencanaan Program LKJIP	
2. Inpres RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	2. Memahami Tugas dan Fungsi Perencanaan Program	
3. Permen PAN No. PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah.	3. Memiliki kemampuan mengolah data dengan komputer	
4. Permen PAN No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.		
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan	
1. SOP Penyusunan Rencana Kerja	1. Petunjuk Teknis Penyusunan LKJIP	
2. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja	2. Hasil Evaluasi Renstra	
3. SOP Penyusunan Rencana Kerja tahunan	3. Komputer/Printer	
4.	4. ATK	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
1. Apabila dokumen LKJIP terlambat disusun, maka akan berpengaruh terhadap perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas di lingkungan BPBD	1. Mengarsipkan dokumen LKJIP dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>	

SOP PENYUSUNAN DOKUMEN LKJIP /LAKIP

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		JFU/Staf	JFT	Sekretaris	Kalak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima dan mengandatangani surat Sekretaris Daerah mengenai penyusunan LKJIP dan melampirkan lembar disposisi					Surat penyusunan LKJIP, lembar disposisi dan buku agenda	5 menit	Surat penyusunan LKJIP	
2.	Menelaah surat penyusunan LKJIP, mendisposisi dan memaraf lembar kerja disposisi serta mengkoordinasikan dengan kepala bidang untuk di tindak lanjut					Surat penyusunan LKJIP dan lembar disposisi	2 menit	Surat penyusunan LKJIP	
3.						Surat penyusunan LKJIP	30 menit	Konsep Penyusunan LKJIP	
4.	Mengetik konsep dokumen LKJIP dan apabila telah selesai menyerahkan kembali kepada JFT/Perencana Ahli Muda untuk di koreksi apabila ada kesalahan akan diperbaiki dan bila benar langsung di beri paraf					Konsep penyusunan LKJIP	60 menit	DPA, Renja, Renstra, dokumen Morev anggaran	
5.	Meneliti dan memaraf konsep renstra, apabila terdapat kekeliruan dikembalikan kepada JFU untuk diperbaiki kembali					DPA, Renja, Renstra, dokumen Morev anggaran	10 menit	Dokumen penyusunan LKJIP yang sdh ada disposisi	
6.	Meneliti, mengoreksi dan apabila ada kesalahan akan perbaikan dan apabila sudah sesuai maka akan memaraf konsep tersebut					Dokumen penyusunan LKJIP yang sdh ada disposisi	5 menit	Dokumen penyusunan LKJIP yang sdh ada disposisi	
7.	Menelaah dan menanda tangani konsep LKJIP					Dokumen penyusunan LKJIP yang sdh ada disposisi	5 menit	Dokumen LKJIP yang sdh bertanda tangan	
8.	Menggandakan serta mengarsipkan dokumen LKJIP					Dokumen LKJIP yang sdh bertanda tangan	180 menit	Dokumen LKJIP yang sdh bertanda tangan	Dokumen LKJIP dikirim ke OPD yang terkait serta diarsipkan secara hard dist dan soft copy

BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP

TRIWULAN IV - 2024

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Delapan** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** telah dilakukan Rekonsiliasi antara **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Barang** dengan **Pengurus Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur**.

Adapun hasil kegiatan rekonsiliasi tersebut adalah :

No	Uraian	Jumlah
4a=1+2-3	Saldo Awal 2024 Setelah Koreksi - Per 01 Januari 2024	73.715.256.254,00
4b=SUM(a:h)	Penambahan	2.024.838.500,00
5=SUM(a:j)	Pengurangan	-
6=4b-5	Mutasi Aset Tetap 2024	2.024.838.500,00
7=4a+6	Saldo Akhir Neraca Per 31 Desember 2024 (UNAUDIT)	75.740.094.754,00
10=8-9	Koreksi Inspektorat Akumulasi	-
13=11-12	Koreksi BPK Akumulasi	-
14=10+13	Koreksi Inpektorat dan BPK-RI	-
15=7+14	Saldo Awal 2025 - Per 01 Januari 2025 (AUDITED)	75.740.094.754,00
18=15+16-17	Saldo Awal 2025 Setelah Koreksi - Per 01 Januari 2025	75.740.094.754,00

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan laporan **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur**.

YANG MELAKUKAN REKONSILIASI



Pengurus Barang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Chili Alvianno
NIP. 198409252010011010


Analisis Aset Daerah
BPKAD Prov. Kaltim

Ade Sukmawan, S.Pd.
NIP. 19790924 201406 1 001

ADMIN SIPBMD
BPKAD Prov. Kaltim


Hendri Irawan, S.Sos

Rekonsiliasi

Diketahui pada tanggal 05 Januari 2025 15.07.14

No	Uraian	Tanah (Rekening Belanja 5.2.1.)	Peralatan dan Mesin (Rekening Belanja 5.2.2.)	Gedung dan Bangunan (Rekening Belanja 5.2.3.)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Rekening Belanja 5.2.4.)	Aset Tetap Lainnya (Rekening Belanja 5.2.5.)	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Lainnya (Rekening Belanja 5.2.6.)	Total Aset (Selain Aset Lainnya)
1	Saldo Awal 2024 - Per 01 Januari 2024	1.500.000.000	57.772.810.704	14.201.292.750	90.000.000	68.402.800	82.750.000	2.492.339.300	73.715.256.254
2	Koreksi Bertambah Saldo Awal 2024 - Per 01 Januari 2024	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Koreksi Berkurang Saldo Awal 2024 - Per 01 Januari 2024	-	-	-	-	-	-	-	-
4a=1+2-3	Saldo Awal 2024 Setelah Koreksi - Per 01 Januari 2024	1.500.000.000	57.772.810.704	14.201.292.750	90.000.000	68.402.800	82.750.000	2.492.339.300	73.715.256.254
4b=SUM(4a:h)	Penambahan	-	2.024.838.500	-	-	-	-	804.016.290	2.024.838.500
4.c	LRA Belanja Modal Rek 5.2. - Per 31 Desember 2024	-	2.024.838.500	-	-	-	-	804.016.290	2.024.838.500
4.b	LRA Belanja Aset dan Jasa - Yang Menjadi Aset Tetap (Kesejahteraan Pengangg	-	-	-	-	-	-	-	-
4.c	LRA Belanja Modal - Reklasifikasi Sesama Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-
4.d	Hasil Inventarisasi / Ubah Kondisi	-	-	-	-	-	-	-	-
4.e	Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-
4.f	Mutasi Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
4.g	Utang Belanja Modal 2023 & 2024 - Sudah SPP Belum SP2D	-	-	-	-	-	-	-	-
4.h	Pembatalan Pengakuan Aset Lainnya yang Kembali menjadi Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-
5=SUM(4a:i)	Pengurangan	-	-	-	-	-	-	-	-
5.a	Utang Belanja Modal 2023 - Sudah SPP Belum SP2D	-	-	-	-	-	-	-	-
5.b	LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Kesejahteraan Penganga	-	-	-	-	-	-	-	-
5.c	LRA Belanja Modal - Reklasifikasi Sesama Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-
5.d	LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Di bawah Nilai Kapital	-	-	-	-	-	-	-	-
5.e	LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Diperhatikan ke Masya	-	-	-	-	-	-	-	-
5.f	LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Menjadi Persediaan)	-	-	-	-	-	-	-	-
5.g	Hasil Inventarisasi / Ubah Kondisi	-	-	-	-	-	-	-	-
5.h	Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-
5.i	Mutasi Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
5.j	Penghapusan	-	-	-	-	-	-	-	-
6=4b-5	Mutasi Aset Tetap 2024	-	2.024.838.500	-	-	-	-	804.016.290	2.024.838.500
7=4a+6	Saldo Akhir Neraca Per 31 Desember 2024 (UNAUDIT)	1.500.000.000	59.797.649.204	14.201.292.750	90.000.000	68.402.800	82.750.000	3.296.355.590	75.740.094.754
8	Koreksi Inspektorat bertambah (AUDIT)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Koreksi Inspektorat berkurang (AUDIT)	-	-	-	-	-	-	-	-
10=8-9	Koreksi Inspektorat Akumulasi	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Koreksi BPK bertambah (AUDIT)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Koreksi BPK berkurang (AUDIT)	-	-	-	-	-	-	-	-
13=11-12	Koreksi Brk Akumulasi	-	-	-	-	-	-	-	-
14=10+13	Koreksi Inspektorat dan BPK RI	-	-	-	-	-	-	-	-
15=7+14	Saldo Awal 2025 - Per 01 Januari 2025 (AUDITED)	1.500.000.000	59.797.649.204	14.201.292.750	90.000.000	68.402.800	82.750.000	3.296.355.590	75.740.094.754
16	Koreksi Bertambah Saldo Awal 2025 - Per 01 Januari 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Koreksi Berkurang Saldo Awal 2025 - Per 01 Januari 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
18=15+16-17	Saldo Awal 2025 Setelah Koreksi - Per 01 Januari 2025	1.500.000.000	59.797.649.204	14.201.292.750	90.000.000	68.402.800	82.750.000	3.296.355.590	75.740.094.754



LAPORAN BMD
INTRAKOMPTABEL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEMESTER II
TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penggolongan dan Klasifikasi Barang				Jumlah BMD	Saldo Akhir (Rp)
Kode Barang		Nama Barang			
1		2		3	4
1	1		Aset Lancar		
1	1	7	Persediaan *)		
1	3		Aset Tetap	1366	75.740.094.754,00
1	3	1	Tanah	1	1.500.000.000,00
1	3	2	Peralatan dan Mesin	1168	59.797.649.204,00
1	3	3	Gedung dan Bangunan	3	14.201.292.750,00
1	3	4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2	90.000.000,00
1	3	5	Aset Tetap Lainnya	190	68.402.800,00
1	3	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2	82.750.000,00
1	3	7	Akumulasi Penyusutan		
1	5		Aset Lainnya	193	3.296.355.590,00
1	5	2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0,00
1	5	3	Aset Tidak Berwujud	10	1.211.000.290,00
1	5	4	Aset Lain-lain	183	2.085.355.300,00
1	5	5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
1	5	6	Akumulasi Penyusutan Aset lainnya		

*) tidak berlaku intrakomptabel



Samarinda, 03 Februari 2025

Pengelola Keputusan dan Inventaris Barang

Chih Alvianna

NIP. 19840925 201001 1 010

REKONSILIASI ASET TETAP DENGAN BELANJA MODAL DI SIMDA KEUANGAN DAN SIMDA BMD
TRIWULAN IV - 2024

No	URAIAN	ASET TETAP							ASET LAINNYA			
		TANAH	ALAT DAN MESIN	GEDUNG BANGUNAN	JALAN JARINGAN	ASET TETAP LAIN	KOP	TOTAL	RUSAK BERAT	ASET YANG AKAN DILELANGKAN	TIDAK BERWUJUD	TOTAL
A.	Saldo Akhir Neraca (31 Des 2023)	1.500.000.000,00	57.772.810.704,00	14.201.292.750,00	90.000.000,00	68.402.800,00	82.750.000,00	73.715.256.254,00	2.085.355.300,00	-	406.984.000,00	2.492.339.300,00
B.	Koreksi data tahun 2023, (jika ada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	Saldo awal (1 Jan 2024) s/d koreksi	1.500.000.000,00	57.772.810.704,00	14.201.292.750,00	90.000.000,00	68.402.800,00	82.750.000,00	73.715.256.254,00	2.085.355.300,00	-	406.984.000,00	2.492.339.300,00
D.	Belanja Modal s/d 31 Desember 2024	-	2.024.898.500,00	-	-	-	-	2.024.898.500,00	-	-	804.016.290,00	804.016.290,00
E.	Koreksi-koreksi transaksi tahun 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Pengurangan :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Penambahan:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Reklasifikasi Antar Aset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Saldo akhir aset tetap di Neraca per 31 Desember 2024	1.500.000.000,00	59.797.649.204,00	14.201.292.750,00	90.000.000,00	68.402.800,00	82.750.000,00	75.740.094.754,00	2.085.355.300,00	-	1.211.000.290,00	3.296.355.590,00
	Neraca Pada Simda BMD 31 Desember 2024	1.500.000.000,00	59.797.649.204,00	14.201.292.750,00	90.000.000,00	68.402.800,00	82.750.000,00	75.740.094.754,00	2.085.355.300,00	-	1.211.000.290,00	3.296.355.590,00
	Selisih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan :

2